

Dampak Kebijakan Daendels dan Raffles pada Perubahan Sosial Kontemporer

Khalisha,^{1*} Belkis Nurbaiti,¹ Rifki Putra Pratama¹

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

Email: divaaputrii6@gmail.ac.id, belkisnurbaiti@gmail.com,
rifkiputrapratama@gmail.com

*Korespondensi



Received: 03-02-2025, Revised: 11-01-2026, Accepted: 11-01-2026, Published: 11-01-2026

Abstrak

Kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles selama masa kolonial di Nusantara memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial. Daendels dikenal dengan proyek infrastruktur, terutama pembangunan Jalan Raya Pos, yang mempercepat mobilitas dan pengendalian kolonial, tetapi juga menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Sementara itu, Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah (*landrent system*) yang mengubah pola kepemilikan lahan dan ekonomi agraris, meskipun implementasinya menghadapi tantangan sosial. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berdampak pada masa kolonial, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan Indonesia di era modern. Reformasi administrasi yang diperkenalkan oleh kedua tokoh ini turut menjadi dasar bagi sistem birokrasi yang masih digunakan saat ini. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan Daendels dan Raffles membentuk struktur masyarakat Nusantara serta mewariskan sistem yang masih relevan dalam kebijakan pembangunan Indonesia kontemporer. Dengan pendekatan historis-kritis dan analisis literatur, penelitian ini mengungkap relevansi warisan kolonial dalam dinamika sosial-politik Indonesia saat ini serta memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kebijakan kolonial dan transformasi sosial jangka panjang.

Kata Kunci: Herman Willem Daendels; Kebijakan Kolonial; Perubahan Sosial; Thomas Standford Raffles

Abstract

The policies implemented by Herman Willem Daendels and Thomas Stamford Raffles during the colonial period in the Archipelago had a significant impact on social change. Daendels was known for his infrastructure projects, particularly the construction of the Great Post Road, which accelerated mobility and colonial control but also led to labor exploitation. Meanwhile, Raffles introduced the land rent system, altering land ownership patterns and the agrarian economy, though its implementation faced social challenges. These policies not only influenced the colonial period but also shaped Indonesia's socio-economic dynamics and governance in the modern era. The administrative reforms introduced by both figures laid the foundation for the bureaucratic system still in use today. This article examines how Daendels' and Raffles' policies shaped the social structures of the Archipelago and left a lasting legacy that remains relevant to contemporary Indonesian development policies. Using a historical-critical approach and literature analysis, this study explores the relevance of colonial legacies in Indonesia's socio-political dynamics while

providing a new perspective on the long-term relationship between colonial policies and social transformation.

Keywords: Colonial Policies; Herman Willem Daendels; Social Change; Thomas Stamford Raffles



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles selama masa penjajahan di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, yang dampaknya masih terasa hingga masa kini. Sebagai pemimpin kolonial, baik Daendels maupun Raffles memiliki pendekatan unik dalam mengelola wilayah Nusantara, dengan prioritas utama meningkatkan kontrol kolonial dan mengeksploitasi sumber daya lokal demi kepentingan pemerintah penjajah. Daendels dikenal karena program ambisiusnya di bidang infrastruktur, seperti pembangunan Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*), yang dirancang untuk memperkuat jaringan transportasi dan komunikasi kolonial. Selain itu, ia juga menerapkan reformasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dalam mendukung kekuasaan kolonial. Sementara itu, Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah (*landrent system*) yang menggantikan model tradisional feodalisme, serta berupaya memetakan potensi sumber daya alam dan budaya lokal. Kedua pendekatan ini memberikan kontribusi besar terhadap perubahan struktur masyarakat dan pola kehidupan ekonomi yang masih relevan di era kontemporer.

Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada hasil material, seperti infrastruktur atau reformasi administratif, tetapi juga menciptakan perubahan dalam hubungan sosial dan pola pikir masyarakat. Misalnya, intervensi kolonial secara tidak langsung mendorong munculnya struktur kelas baru dan mengubah pola hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Dalam perkembangan sosial Indonesia modern, pengaruh kebijakan kolonial ini dapat dilihat pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, disrupsi budaya lokal, dan orientasi pembangunan yang cenderung mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan fokus pada analisis kebijakan masing-masing tokoh secara terpisah. Seperti, artikel yang membahas terkait kebijakan pemerintahan kekuasaan Herman Willem Daendels di Jawa antara tahun 1808-1811 (Raharjo, 2024), dan artikel jurnal yang membahas peran Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa (1811-1816), terutama dalam kebijakan sistem pajak tanah yang menggantikan sistem tanam paksa peninggalan belanda (Setyawan, 2020). Namun, belum banyak kajian yang mengintegrasikan kedua kebijakan ini untuk memahami relevansi dan dampaknya terhadap konteks sosial-politik modern di Indonesia, khususnya dalam membangun kesadaran akan warisan kolonial dalam pembangunan sosial saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk memahami hubungan kompleks antara kebijakan kolonial dan dinamika sosial kontemporer, serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan pembangunan di masa depan.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang menghubungkan kebijakan kolonial Daendels dan Raffles dengan perspektif masa kini. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih holistik untuk menjembatani kaitan sejarah kolonial dengan dinamika sosial modern di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dampak kebijakan Daendels dan Raffles terhadap perubahan sosial di Nusantara pada abad ke-19, dan menganalisis relevansi dampak tersebut terhadap pembangunan sosial dan tata kelola di masa kini. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan kolonial terhadap transformasi sosial di Nusantara serta pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan modernitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur (*literature review*) (Adlini et al., 2022). untuk mengkaji dampak kebijakan Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles terhadap perubahan sosial di Nusantara pada abad ke-19. Data yang digunakan bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku dan artikel akademik yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kebijakan utama yang diterapkan oleh kedua tokoh kolonial, seperti pembangunan Jalan Raya Pos oleh Daendels dan reformasi agraria oleh Raffles, serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Nusantara.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah perubahan sosial yang terjadi akibat kebijakan kolonial pada abad ke-19, dengan objek kajian berupa kebijakan Daendels dan Raffles. Penelitian ini juga mengkaji konteks sejarah kebijakan tersebut untuk memahami bagaimana perubahan yang terjadi di masa kolonial memberikan pengaruh berkelanjutan pada tatanan sosial masyarakat hingga era modern. Dengan pendekatan ini, artikel berupaya memberikan perspektif historis yang relevan dalam memahami dinamika sosial-politik di Indonesia masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Awal Kedatangan Daendels dan Penetapan Prioritas Pemerintahan

Masa perubahan di Hindia Belanda dimulai dengan kedatangan Herman Willem Daendels, yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal oleh Louis Bonaparte, Raja Belanda. Daendels tiba di Jawa pada awal tahun 1808 dengan menumpang kapal Amerika yang berhasil melewati blokade Inggris. Ia dikenal sebagai seorang Jacobin sekaligus pengagum Napoleon Bonaparte, bahkan sempat mengibarkan bendera Prancis di Batavia ketika Belanda menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis. Herman Willem Daendels lahir di Hattem, Belanda, pada 21 Oktober 1762 (Sinaga, et al., 2024; Harahap, et al., 2024; Raharjo, 2024). Ia adalah putra dari Burchard Johan Daendels, seorang hakim kota di Provinsi Gelderland, dan Josina Christina van Tulleken. Daendels merupakan anak kedelapan dari tiga belas bersaudara, namun hanya empat di antaranya yang bertahan hingga dewasa.

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah di Hattem pada tahun 1781, Daendels, yang awalnya diproyeksikan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai hakim kota, melanjutkan studi hukum di Harderwijk. Di sana, ia mulai tertarik dengan gagasan-gagasan modern tentang ketatanegaraan dan filsafat. Selama masa

kuliah, Daendels terpengaruh oleh ide-ide kaum patriot yang disampaikan oleh para dosennya (Nurbaiti, 2025). Pada waktu itu, gerakan patriot di Belanda sedang giat berusaha mengubah sistem ketatanegaraan, terinspirasi oleh perjuangan kaum Republikan di Prancis yang menentang monarki.

Pada Januari 1795, Herman Willem Daendels bersama pasukan Prancis menyerbu Kerajaan Belanda atas perintah Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis saat itu. Serangan tersebut berhasil menduduki Belanda dan memaksa tercapainya Traktat Den Haag, sebuah perjanjian antara Kerajaan Belanda dan Republik Prancis. Setelah itu, Belanda berada di bawah kendali Prancis. Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte, kemudian diangkat sebagai penguasa Belanda, menjadikan negeri tersebut sebagai bagian dari prefekturat Prancis. Perubahan pemerintahan di Belanda ini juga berdampak pada wilayah jajahannya di Hindia Timur, khususnya Jawa, yang menjadi perhatian serius Louis Napoleon. Rivalitas politik antara Prancis dan Inggris di Eropa membawa dampak langsung ke Hindia Timur. Jawa dianggap perlu dipertahankan dari kemungkinan serangan Inggris, sehingga diperlukan seorang Gubernur Jenderal yang kuat. Herman Willem Daendels ditugaskan untuk menjalankan peran ini. Sebelum berangkat ke Jawa, Daendels diberikan dua misi utama. Pertama, ia harus mempertahankan Jawa dari ancaman Angkatan Laut Inggris. Kedua, ia diminta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berbeda dari gaya korup para pejabat VOC yang sebelumnya memimpin.

Daendels menerima serangkaian intruksi penting sebelum ia berlayar menuju Jawa, wilayah yang belum pernah dikunjungi dan asing bagi dirinya. Berdasarkan (Marihandono, 2014), pada tanggal 28 Januari 1807, Daendels secara resmi menerima mandat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Louis Napoleon atas instruksi Napoleon Bonaparte. Setelah itu, berbagai persiapan dilakukan hingga akhirnya, pada tanggal 9 Februari 1807 Louis Napoleon menandatangani dokumen berisi arahan yang harus dijalankan oleh Daendels.

Arahan yang akan di laksanakan yaitu membubarkan dan membentuk kembali Pemerintahan Tinggi di Batavia sedangkan intruksi yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Koloni dan Wilayah Asia ada 37 pasal, 6 pasal di antara nya khusus untuk arahan. Mengingat besarnya tanggung jawab yang harus di emban, Louis Napoleon memutuskan untuk menaikkan pangkat Daendels dari Kolonel Jenderal menjadi Marsekal. Sehingga Daendels diharapkan melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Louis Napoleon dalam intruksinya. Daendels tiba di Jawa pada 1 Januari 1808, mendarat di Anyer, Banten dengan menempuh perjalanan selama sepuluh bulan dari Eropa. Dari Anyer, ia melanjutkan perjalanan ke Batavia untuk menemui Gubernur Jenderal Henricus Albert Wiese. Berdasarkan (Marihandono, 2011), setelah tiga hari perjalanan, 4 Januari 1808 Daendels disambut oleh Komandan Militer Serang, PP. Dupuji sebelum bertemu dengan Wiese. Akhirnya, pada 14 Januari 1808, ia secara resmi menerima jabatan dari Wiese. Dengan pengangkatan ini Herman Willem Daendels mulai menjalankan tugasnya. Selama perjalanan pertamanya di Jawa, Daendels mendapati kondisi jalan yang sempit, berlumpur dan tidak layak. Situasi ini membuatnya menyadari bahwa infrastruktur yang buruk dapat melemahkan pertahanan Jawa, terutama dalam menghadapi potensi serangan dari Inggris. Kesadaran ini menjadikan pembangunan jalan sebagai prioritas utama dalam masa awal pemerintahannya. (Hoogendijk, 2013).

Dampak Pembangunan *Groote Postweg* terhadap Mobilitas Sosial dan Ekonomi

Pada 14 Januari 1808 Daendels meluncurkan proyek pertahanan pertama di Jawa yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan ujung barat dan timur Pulau Jawa. Selain itu, ia juga memerintahkan pembangunan dua fasilitas dan pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen (Ujung Kulon) dan Ujung Manari (Gresik). Daendels menetapkan bahwa pembangunan jalan ini harus selesai dalam satu waktu satu tahun (Toer, 2006). Rute jalan yang dibangun adalah Anyer Batavia, ia memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Rute ini sudah ada sebelumnya dan jalur pertama yang dia lalui saat ia mendarat. Sebelumnya, perjalanan ini memakan waktu empat hari, namun setelah diperkeras dan diperlebar, rute ini dapat ditempuh hanya dalam sehari. Pekerjaan ini mudah karena kondisi medan yang datar. Hanya hambatan berupa hutan belantara yang membentang sepanjang lebih kurang 40 km menambah kesulitan yang berarti. (Toer, 2006).

Daendels memilih Anyer sebagai titik awal karena merupakan pelabuhan terbesar di Jawa dan potensial sebagai titik pendaratan Inggris. Jalan raya ini bertujuan mempercepat pergerakan pasukan untuk menghadapi ancaman Inggris. Pembangunan jalan dilanjutkan dari Batavia ke Buitenzorg, Priangan dan Karangsembung dengan biaya pemerintah, namun dari Karangsembung ke Surabaya, pembangunannya diserahkan kepada para Bupati di Semarang karena keterbatasan anggaran. Setelah bertemu dengan para Bupati di Semarang pada Juli 1808, Daendels memutuskan untuk membangun jalan raya dengan pos pergantian kuda setiap lima paal (1,6 km). Jalan ini yang dikenal sebagai *Groote Postweg*, menjadi jalur utama penghubung Pulau Jawa dan mendorong pertumbuhan industri di sepanjangnya (Aman, 2014).

Perubahan Struktur Kota Di Bantam (Serang)

Banten pada awalnya merupakan kawasan pelabuhan yang maju dan berkembang sebagai jalur penting perdagangan VOC. Wilayah ini sudah dikenal oleh pelaut Portugis, Arab, Cina, dan Moor sebagai pusat transaksi rempah-rempah, menjadikannya kota yang makmur. Banten dihuni oleh penduduk asli serta pendatang, dan berkembang menjadi kota "kosmopolitan" dengan beragam klaster perkampungan etnis yang tersebar di wilayah tersebut. Setelah masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten akhirnya jatuh ke tangan VOC. Kehadiran Herman Willem Daendels yang membangun Jalan Raya Pos (*De Groote Postweg*) mengubah orientasi kota Banten, yang sebelumnya berpusat pada aktivitas laut, menjadi lebih berfokus ke pedalaman (Yuliati, 2013). Kota Serang, yang awalnya hanya kota kecil, mulai berkembang pesat setelah dilewati oleh Jalan Raya Pos. Akibatnya, peran kota Banten menurun, dan wilayah ini berubah menjadi kawasan nelayan.

Perubahan Struktur Kota di Batavia (Jakarta)

Penaklukan Pelabuhan Jayakarta oleh Belanda menjadi awal mula berdirinya kota Batavia, yang kemudian dijadikan pusat administrasi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini terjadi karena Pelabuhan Bantam (Banten), yang lebih besar, sudah dipadati oleh kantor-kantor perdagangan dari berbagai bangsa seperti

Portugis, Spanyol, dan Inggris untuk aktivitas perdagangan. Untuk memperkuat pertahanan, Belanda membangun Benteng Batavia, yang juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Pertumbuhan Batavia tidak lepas dari keberadaan Pelabuhan Sunda Kalapa dan aliran Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah tersebut. Pada tahun 1808, kedatangan Herman Willem Daendels membawa perubahan signifikan dengan pembangunan Jalan Raya Pos (*De Groote Postweg*) yang menghubungkan (Syafaah, 2018) Anyer dan Batavia. Selama berada di Batavia, Daendels memindahkan pusat pemerintahan dari sekitar Benteng Batavia ke kawasan Weltevreden, yang kini meliputi area Monas dan Lapangan Banteng.

Perkembangan Batavia yang sebelumnya terpusat di sepanjang Sungai Ciliwung dengan arah utara-selatan mulai berubah setelah adanya pembangunan Jalan Raya Pos dan pengembangan wilayah Weltevreden. Berbagai kantor pemerintahan dan permukiman mulai berpindah ke sekitar jalur baru ini. Jalan tersebut juga melanjutkan rute ke arah selatan menuju Buitenzorg (Bogor) melalui wilayah Meester Cornelis (sekarang Matraman-Jatinegara), yang kemudian berkembang menjadi lokasi berbagai fasilitas seperti rumah sakit, universitas, dan gedung pemerintahan di sepanjang jalur tersebut.

Perubahan Struktur Kota di Buitenzorg (Bogor)

Pemilihan Buitenzorg (sekarang Bogor) sebagai bagian dari jalur yang dilalui oleh Jalan Raya Pos (*De Groote Postweg*) didasarkan pada keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff di Parung Angsana (sekarang Kampung Baru) (Dinas Tata Ruang Kota Bogor, 2013). Seiring waktu, rumah peristirahatan ini berkembang menjadi Istana Buitenzorg yang kemudian secara resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini menjadikan Buitenzorg simpul strategis untuk aksesibilitas politik, sehingga Daendels memutuskan untuk mengalihkan jalur pantai utara *De Groote Postweg* ke arah selatan melalui Buitenzorg.

Pengembangan jalur *De Groote Postweg* di wilayah Buitenzorg pada dasarnya memanfaatkan jalur lokal yang sudah ada sebelumnya. Namun, karena jalan tersebut tegak lurus terhadap Istana, jalur utama dibelokkan mengitari istana, yang kemudian membentuk area yang kini dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Kehadiran *De Groote Postweg* turut mendorong transformasi Buitenzorg dari wilayah kabupaten menjadi salah satu kota besar di Jawa Barat, yang kini dikenal dengan keberadaan Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor. Perkembangan kota Bogor berpusat di sekitar Kebun Raya Bogor, yang menjadi elemen utama dalam tata kota. Saat ini, berbagai jalan protokol yang menghubungkan kawasan tersebut dengan jalan lingkar Kebun Raya Bogor telah berkembang menjadi pusat utama aktivitas perdagangan dan jasa.

Perubahan Struktur Kota di Bandoeng (Bandung)

Bandung awalnya merupakan sebuah wilayah pemukiman yang kemudian berkembang menjadi kota. Pada tahun 1810, Bandung ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, lalu menjadi ibu kota Keresidenan Priangan pada tahun 1864, dan akhirnya berstatus sebagai gemeente pada tahun 1906. Awalnya, pusat pemerintahan Bandung pada abad ke-17 berada di Karapyak (Dayeuhkolot).

Namun, karena kawasan tersebut sering dilanda banjir, Bupati Wiranata Kusumah II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan.

Pemindahan ini dilakukan seiring dengan keberadaan Jalan Raya Pos (*De Groote Postweg*) yang melewati wilayah Bandung. Pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan yang lebih dekat dengan akses jalan tersebut, tepatnya di sekitar Sungai Cikapundung dan Cibadak, di wilayah Andawadak. Meskipun area ini awalnya berupa hutan belukar, tanahnya dianggap subur dan cocok untuk pertanian. Pemilihan lokasi ini berbeda dari tradisi lokal yang biasanya berdasarkan kearifan setempat dalam menentukan tempat tinggal atau mendirikan kota. Dalam proses pemindahan, Daendels menetapkan sebuah titik yang direncanakan sebagai awal pembangunan kota Bandung, yaitu titik nol yang kini berada di sekitar Kantor PU Provinsi. Bupati Bandung kemudian terus mengembangkan wilayah tersebut, termasuk kawasan yang dilalui oleh Jalan Raya Pos. Salah satu wilayah yang berkembang pesat adalah sekitar Alun-Alun Bandung, yang menjadi ikon kota hingga saat ini. Pada masa kini, Jalan Raya Pos di Bandung telah berkembang menjadi Jalan Asia Afrika, yang juga menjadi lokasi Kantor Pos peninggalan era kolonial.

Perubahan Struktur Kota di Cheribon (Cirebon)

Struktur kota kuno Cirebon mengikuti konsep cosmic city, yaitu kota yang bersifat hierarkis konsentris dan dirancang secara terencana meskipun tidak memiliki bentuk geometris. Keraton Kasepuhan dan Kanoman berperan sebagai pusat perkembangan kota, terletak strategis di antara dua sungai. Posisi ini memberikan keuntungan geografis, baik secara politis dan ekonomis, sekaligus memiliki nilai spiritual dan kosmomagis terkait Gunung Meru. Pada tahun 1855, struktur kota Cirebon masih sederhana, dengan pusat kota yang cenderung mengarah ke pelabuhan. Kehadiran Belanda membawa perubahan besar, mengubah Cirebon menjadi kota berbasis benteng pelabuhan. Peran keraton yang melemah akibat dominasi Belanda menyebabkan pola kota beralih dari konsep cosmic city menjadi kota dengan orientasi pesisir dan pelabuhan. Perkembangan ini semakin diperkuat oleh keberadaan Jalan Raya Pos (*De Groote Postweg*) yang melintasi Cirebon, menghubungkan Karangsambung dengan Tegal di sepanjang pantai utara.

Pembangunan Jalan Raya Pos juga berdampak pada pertumbuhan industri di sekitar Cirebon, terutama pabrik-pabrik gula yang muncul akibat kebijakan tanam paksa di Pulau Jawa. Memasuki awal abad ke-20, kebijakan desentralisasi pemerintah kolonial menyebabkan terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru, seperti pemerintahan kabupaten di kawasan Kejaksan. Lokasi ini berbeda dari pola awal yang mendekati pelabuhan, karena lebih mengarah ke kawasan yang dekat dengan Jalan Raya Pos (Bachtiar et al., 2022).

Jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels tidak hanya mendukung mobilitas militer, tetapi juga mempercepat pengangkutan saksi, tawanan dan produk hasil bumi. Ini memperpendek waktu perjalanan antara Batavia dan Surabaya dari 2-3 minggu menjadi satu minggu, mendukung integrasi Jawa di bawah pusat kekuasaan Batavia. Untuk pertahanan, Daendels membangun benteng di Ancol, Weltevreden dan Meester Cornelis dan Meester Cornelis ini yang dianggap terkuat. Selain itu, ia mendirikan benteng di Gresik, Anyer dan Yogyakarta, serta memperkuat pasukan

militer dengan membentuk pasukan Jayasengkar dan Prangwedana yang dilatih dengan baik. Peningkatan kekuatan militer ini mendapatkan pujian dari Lord Minto.

Pulau Jawa sebagai pulau dengan populasi terbesar dan pertumbuhan perkotaan yang pesat, memiliki sejumlah kota yang perkembangannya dipengaruhi oleh sejarah kolonial. Kota-kota disepanjang pesisir utara Jawa tumbuh sebagai pusat persinggahan, perdagangan jasa dan pelabuhan. Banyak dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya yang awalnya merupakan kawasan agraris kemudian berkembang menjadi permukiman, terutama di sekitar pesisir dan aliran sungai. Kota-kota seperti Serang dan Bogor yang sebelumnya kecil, tumbuh menjadi pusat ekonomi penting karena akses langsung ke laut ini. Kehadiran *De Groote Postweg* berperan penting dalam perkembangan wilayah yang dilintasi, menjadikannya mobilitas orang dan barang di utara Jawa. (Hartatik, 2016).

Keberadaan *De Groote Postweg* juga memperkuat perdagangan dan logistik, khususnya wilayah pesisir utara Jawa. Pertumbuhan kawasan industri dan pembangunan infrastruktur baru di sekitar jalan ini mengubah lahan agraris menjadi pusat ekonomi modern. Kota seperti Cirebon mengalami transformasi dengan pertumbuhan pabrik gula akibat kebijakan tanam paksa, yang mendukung ekonomi lokal meskipun sering kontroversial (Hermawan et al., 2020). *De Groote Postweg* memfasilitasi konektivitas antarwilayah, meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik. Sebelumnya, transportasi darat di Jawa sangat terhambat oleh kondisi jalan yang buruk. Pembangunan ini juga memperluas jaringan perdagangan kolonial, membuatnya lebih teroganisir dan terpusat di kota-kota strategis (Nas & Pratiwo, 2020).

Dampak Kebijakan Raffles terhadap Perubahan Sosial

Ketika Hindia Belanda digantikan oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1811, Inggris mulai memperkuat kendali mereka, khususnya di Pulau Jawa. Masa pemerintahan Inggris ini dikenal dengan kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Meskipun demikian, kekuasaan Inggris di Jawa berlangsung cukup singkat, yaitu dari tahun 1811 hingga 1816. Tak lama setelah Herman Willem Daendels menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya, J. W. Janssens (yang menjabat dari Mei hingga September 1811), Pulau Jawa menghadapi ancaman invasi. Pasukan ekspedisi Inggris berhasil merebut Jawa melalui serangan cepat yang berlangsung antara Agustus dan September 1811. Melalui Perjanjian Kapitulasi Tuntang (dekat Semarang) pada 18 September 1811, Janssens terpaksa menyerahkan Pulau Jawa beserta wilayah-wilayah taklukannya kepada Inggris (Nurbaiti, 2025). Awalnya, Inggris berencana menghancurkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis di kawasan Timur Jauh. Namun, Gubernur Jenderal Lord Minto memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara di sana. Akhirnya, muncul gagasan untuk mempertahankan Jawa sebagai bagian dari koloni Inggris.

Thomas Stamford Raffles tidak setuju dengan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Oleh karena itu, ia menggantinya dengan memberikan kebebasan kepada para petani untuk menentukan jenis tanaman yang ingin mereka tanam. Perubahan ini mengakhiri praktik sebelumnya, di mana petani dipaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekspor Pemerintah Belanda. Salah satu kebijakan Raffles yang terkenal adalah penerapan sistem sewa tanah atau *landrent*. Melalui sistem ini, petani secara

sukarela menanam tanaman perdagangan (cash crops) yang memiliki nilai ekspor tinggi. Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu dari tahun 1811 hingga 1816. Selama masa kepemimpinannya, ia memperkenalkan sejumlah kebijakan, termasuk penerapan sistem pajak tanah di Jawa. Kebijakan tersebut berdampak signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, dengan tujuan utama untuk mendukung kepentingan Inggris selama masa pemerintahannya.

Kepemimpinan Thomas Stamford Raffles di Jawa (1811-1816) ditandai oleh upayanya mengganti sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dengan sistem sewa tanah (*landrent*). Langkah ini dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India, mengingat kemiripan kondisi kedua wilayah. Pada awalnya, sistem ini diterapkan secara kolektif per desa, namun sejak 1814 diubah menjadi sistem pajak individu (Nurbaiti, 2025). Sayangnya, implementasi sistem ini memberatkan petani, dengan banyak penyelewengan oleh aparat desa akibat lemahnya pengawasan dan singkatnya kekuasaan Inggris di Jawa. Walau bertujuan memakmurkan penduduk, inkonsistensi dalam pelaksanaan aturan membuat kebijakan ini kurang berhasil. Namun, sistem *landrent* tetap diterapkan Belanda hingga 1830. Dampak positif yang tercatat meliputi penurunan angka kejahatan di berbagai wilayah, perhatian terhadap budaya Jawa, seperti candi Borobudur, serta adopsi lalu lintas kiri yang masih berlaku hingga kini. Selain itu, Raffles berkontribusi pada studi biologi dengan beberapa penemuan di Pulau Jawa (Setyawan, 2020).

Reformasi Agraria dan Tata Kelola Lahan

Sejarah reformasi agraria di Indonesia mencerminkan kerumitan dan kepekaan persoalan pertanian. Sebagai sumber daya yang sangat penting, tanah memiliki nilai strategis dan emosional bagi masyarakat Indonesia. Perannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk bersaing di tingkat global. Sepanjang sejarah, tanah sering menjadi pusat konflik akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di antara berbagai kelompok. Ketegangan antara penguasa dan rakyat mengenai kepemilikan tanah telah menjadi ciri khas perjalanan sejarah Indonesia, khususnya di sektor agraria. Mulai dari masa VOC, era tanam paksa, hingga pemerintahan Orde Baru, konflik semacam ini terus berlanjut, meski dalam bentuk yang berbeda di era modern (Rakhman & Hidayat, 2021). Dari perspektif teori sosial dan ekonomi, konflik agraria adalah fenomena yang wajar terjadi. Perebutan tanah telah lama menjadi sumber ketegangan, baik di tingkat individu maupun kelompok, dengan perbedaan persepsi dan kepentingan sebagai pemicu utama. Fenomena ini, yang telah berlangsung sejak masa lampau hingga saat ini, diperkirakan akan tetap menjadi tantangan di masa depan.

Kebijakan agraria Thomas Stamford Raffles di awal abad ke-19 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan tanah dan pertanian di Pulau Jawa. Sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, Raffles berupaya mereformasi sistem agraria yang sebelumnya bersifat feodal dan penuh ketidakpastian hukum. Salah satu langkah utamanya adalah menerapkan sistem pendaftaran tanah untuk memastikan kepemilikan yang jelas, guna mencegah sengketa dan mendorong investasi di sektor pertanian. Raffles juga berusaha membatasi kekuasaan penguasa lokal yang sering mengeksploitasi petani melalui sewa tinggi dan penyerahan hasil panen. Kebijakan ini bertujuan memberikan otonomi lebih besar kepada petani agar

mereka dapat mengelola tanah secara mandiri. Meskipun demikian, pengawasan dari pemerintah kolonial tetap diberlakukan, sehingga kebebasan penuh bagi petani tidak sepenuhnya tercapai.

Raffles mendorong pengembangan pertanian komersial dengan memprioritaskan penanaman tanaman bernilai ekspor tinggi, seperti kopi, gula, dan rempah-rempah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan kolonial sekaligus menjadikan Hindia Belanda salah satu produsen utama tanaman ekspor dunia. Meski diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, peralihan ke pertanian komersial juga membawa tantangan besar. Banyak petani kecil yang sebelumnya mengandalkan pertanian subsisten harus beradaptasi dengan sistem baru yang berorientasi pasar, sehingga meningkatkan risiko dan ketergantungan mereka pada fluktuasi harga. Untuk mendukung kebijakan ini, Raffles fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, irigasi, dan fasilitas transportasi, guna meningkatkan produktivitas dan akses petani ke pasar. Namun, pembangunan ini sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti pemilik tanah besar dan pedagang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kolonial, sementara petani kecil kurang mendapat manfaat.

Dampak sosial dari kebijakan agraria Raffles cukup signifikan, terutama pengusuran petani kecil dari lahan mereka. Tanah-tanah kecil sering kali diambil alih untuk digabung menjadi perkebunan besar yang dikelola oleh pengusaha atau perusahaan komersial, menyebabkan banyak petani kehilangan sumber penghidupan mereka. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin meningkat, memaksa petani untuk beradaptasi dengan perubahan yang tidak selalu menguntungkan. Secara keseluruhan, kebijakan Raffles mencerminkan upaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi kolonial dengan kepentingan masyarakat lokal, meskipun dampaknya sering kali jauh dari harapan dan menimbulkan kompleksitas sosial yang mendalam. (Rosmaida Sinaga, 2024).

Reformasi Administrasi Kolonial

Raffles berusaha mereformasi struktur administrasi dan sistem peradilan dengan menggantikan sistem feodal dengan organisasi pemerintahan modern. Ia mengusulkan agar pemerintahan langsung oleh pejabat yang digaji negara menggantikan sistem pemerintahan tidak langsung melalui kepala-kepala daerah yang bersifat turun-temurun. Namun, upaya Raffles dalam merombak sistem peradilan menunjukkan bagaimana niat baiknya sering terganjal oleh ketidaksabarannya dan pendekatan yang terlalu teoretis. Salah satu kesalahannya adalah mencoba menerapkan lembaga khas Inggris di tanah Jawa, seperti sistem juri, yang sama sekali tidak dikenal dalam tradisi Belanda maupun Jawa. Akibatnya, langkah ini berakhir dengan kegagalan. Selain itu, upaya Raffles untuk menghadirkan keadilan, termasuk perlakuan yang lebih baik terhadap para tahanan, sebagian besar hanya menjadi rencana di atas kertas karena terbatasnya waktu dan dana untuk melaksanakannya. Meski begitu, reformasi ini mencerminkan salah satu upaya terbaik Raffles dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan di Hindia Belanda.

Sebelum meninggalkan Jawa dan menyerahkan administrasi kepada Raffles, Lord Minto telah menetapkan prinsip-prinsip reformasi pajak. Ia menginstruksikan penghapusan segera semua bentuk paksaan dan sistem kuota, serta mengusulkan

perubahan mendasar dalam hak milik dan penggunaan tanah. Dalam dekritnya pada 15 Oktober 1813, Raffles menyatakan bahwa "tanah-tanah milik pemerintah pada umumnya akan disewakan kepada kepala-kepala desa (Nurbaiti, 2025). Selanjutnya, mereka dapat menyewakan kembali tanah-tanah tersebut kepada para pengelola dengan batasan tertentu, dengan ketentuan bahwa harga sewanya tidak memberatkan. Hak semua penyewa yang berada di bawah pemerintah akan dijamin dengan adil, selama mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan setia (Hariyono & Wijaya, 2016).

Relevansi Kebijakan Daendels dan Raffles terhadap Pembangunan Sosial Modern

Kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles selama masa pemerintahan kolonial memiliki relevansi yang penting bagi pembangunan sosial modern di Indonesia. Salah satu kebijakan monumental yang dilakukan Daendels adalah pembangunan Jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*), yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi salah satu proyek besar pada masanya, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem transportasi di Pulau Jawa. Hingga saat ini, Jalan Raya Pos telah berkembang menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai kota besar di Jawa, mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi. Dengan kata lain, proyek ini menjadi cikal bakal sistem infrastruktur modern yang menghubungkan wilayah-wilayah penting di Indonesia.

Selain itu, Daendels juga melakukan reformasi administratif dengan mengurangi pengaruh sistem feodal, yang selama ini memberikan kekuasaan besar kepada para penguasa lokal. Ia memperkuat peran kepala desa dalam sistem pemerintahan, langkah yang mencerminkan awal mula pengelolaan tata pemerintahan yang lebih modern dan terorganisir. Kebijakan ini relevan dengan kondisi sosial Indonesia saat ini, di mana otonomi daerah dan peran pemerintah lokal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan masyarakat. Meskipun penerapan kebijakannya diwarnai dengan pendekatan otoriter, warisan Daendels dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien tetap menjadi pelajaran penting dalam sejarah administrasi publik Indonesia.

Thomas Stamford Raffles, yang menggantikan pemerintahan Daendels di bawah kekuasaan Inggris, juga membawa berbagai reformasi yang berkontribusi pada pembangunan sosial modern. Salah satu kebijakan utamanya adalah penerapan sistem *landrent* (sewa tanah), yang bertujuan untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah. Kebijakan ini memberikan peluang kepada petani untuk mengelola tanah mereka sendiri dengan lebih mandiri, meskipun pengawasannya tetap berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Konsep ini menjadi cikal bakal reformasi agraria di Indonesia, yang hingga kini terus menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan mendorong pemerataan kepemilikan tanah. Meskipun dalam praktiknya kebijakan *landrent* memiliki kelemahan, seperti penyelewengan dalam pelaksanaannya dan beban pajak yang berat bagi petani, upaya ini mencerminkan awal dari sistem agraria yang lebih terstruktur, yang relevan dengan isu pertanian dan pengelolaan sumber daya alam modern (Tendi, 2017).

Selain itu, baik Daendels maupun Raffles menunjukkan perhatian terhadap pengurangan praktik-praktik eksploitatif yang membebani rakyat, seperti kerja paksa dan sistem penyerahan wajib hasil panen. Langkah ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya perlindungan hak-hak rakyat, yang relevan dengan nilai-nilai modern terkait keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam konteks sosial modern, kebijakan semacam ini menjadi inspirasi dalam merumuskan undang-undang yang melindungi hak buruh, petani, dan masyarakat adat dari eksploitasi yang tidak adil. Namun, kebijakan-kebijakan mereka tidak lepas dari berbagai tantangan dan dampak negatif. Ketergesaan dalam implementasi beberapa kebijakan, seperti sistem peradilan modern ala Inggris yang diperkenalkan oleh Raffles, menunjukkan bahwa reformasi yang baik memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kondisi sosial setempat. Kegagalan Raffles dalam mengadaptasi sistem juri, misalnya, menjadi pelajaran bahwa setiap reformasi harus mempertimbangkan konteks budaya masyarakat yang akan menerimanya (Ardiansah, 2023).

Warisan Kolonial dalam Tata Kelola Modern

Warisan kebijakan kolonial tetap memiliki pengaruh signifikan dalam tata kelola modern di Indonesia. Sistem administrasi yang diperkenalkan pada masa kolonial, seperti struktur pemerintahan terpusat dan hierarkis, menjadi cikal bakal birokrasi modern, termasuk peran kepala desa yang masih diterapkan dalam sistem otonomi daerah saat ini. Dalam bidang hukum, banyak undang-undang yang disusun pada era kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih menjadi dasar hukum yang digunakan, meskipun telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks nasional. Infrastruktur peninggalan kolonial, seperti Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Daendels, tetap menjadi jalur transportasi strategis di Pulau Jawa, sementara sistem irigasi yang dirancang saat itu mendukung sektor pertanian modern.

Di bidang agraria, kebijakan Raffles melalui sistem sewa tanah menjadi dasar awal sistem pendaftaran tanah formal yang kini diterapkan dalam program sertifikasi tanah nasional, meskipun konflik agraria tetap menjadi tantangan besar. Reformasi pajak yang dimulai pada masa kolonial juga menjadi fondasi bagi sistem perpajakan modern, yang terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan negara. Selain itu, pelestarian budaya yang dimulai oleh Raffles, seperti dokumentasi budaya Jawa, menjadi inspirasi bagi kebijakan perlindungan cagar budaya dan pariwisata berbasis warisan budaya. Dalam tata kota, pola pengaturan yang diperkenalkan pada masa kolonial, seperti pengembangan kota administratif, tetap menjadi acuan dalam pengembangan perkotaan modern. Warisan kolonial ini, meskipun membawa banyak manfaat dalam efisiensi administrasi dan pembangunan, juga meninggalkan tantangan seperti ketimpangan sosial dan konflik agraria yang masih memerlukan perhatian. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, Indonesia dapat mengelola warisan ini untuk mendukung tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini (Zed, 2017).

Transformasi Sosial di Era Modern

Transformasi sosial di era modern merupakan proses panjang yang tidak terlepas dari akar sejarah, terutama warisan kebijakan kolonial. Pada masa kolonial,

berbagai kebijakan diterapkan untuk memenuhi kepentingan penjajah, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta pengenalan sistem administrasi modern. Sistem ini sering memperkuat stratifikasi sosial berdasarkan ras, etnis, dan kelas, menciptakan ketimpangan yang terus membekas hingga kini. Kolonialisme juga membawa pengaruh terhadap pola produksi ekonomi, dari ekonomi subsisten menuju ekonomi berbasis ekspor, yang membuat banyak wilayah tergantung pada pasar global. Perubahan besar mulai terlihat di era pascakolonial, ketika negara-negara yang baru merdeka berupaya membangun identitas nasional dan membentuk sistem sosial yang lebih mandiri. Proses ini sering disertai dengan reformasi besar-besaran di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk dampak dari sistem sosial-ekonomi yang tidak merata, konflik etnis, dan kesenjangan antara kota dan desa (Claudia et al., 2024).

Era modern juga ditandai oleh revolusi teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi dan globalisasi mempercepat arus informasi dan membuka peluang baru dalam pendidikan, pekerjaan, serta interaksi sosial. Meski demikian, teknologi juga menciptakan tantangan baru, seperti kesenjangan digital antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Pola konsumsi masyarakat juga berubah dengan masuknya budaya global, yang kadang bertabrakan dengan nilai-nilai lokal. Proses urbanisasi yang masif di era modern memberikan dampak signifikan terhadap pola kehidupan sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sering kali menciptakan tekanan pada infrastruktur perkotaan, munculnya kawasan kumuh, serta pergeseran nilai-nilai tradisional. Di sisi lain, urbanisasi juga menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui pusat-pusat inovasi dan industri. Transformasi sosial ini memberikan pelajaran penting bagi pembangunan sosial masa kini.

Salah satu pelajaran utama adalah perlunya perencanaan pembangunan yang berbasis keadilan sosial, dengan mengutamakan pemberdayaan kelompok rentan. Pendidikan dan keterampilan harus menjadi prioritas, mengingat keduanya adalah kunci bagi mobilitas sosial di era modern. Selain itu, pelestarian nilai-nilai budaya lokal menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun identitas yang kuat di tengah arus globalisasi. Agar pembangunan sosial menjadi lebih efektif, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan (Absiroh, 2017). Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan. Dengan belajar dari transformasi masa lalu, masyarakat modern dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Analisis Komparatif: Kebijakan Daendels dan Raffles

Kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles selama masa kolonial di Indonesia memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dalam dampaknya terhadap masyarakat. Secara umum, keduanya bertujuan memperkuat kontrol kolonial dan memaksimalkan eksploitasi sumber daya lokal, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Salah satu persamaan utama adalah eksploitasi tenaga dan sumber daya lokal. Daendels

memanfaatkan tenaga kerja paksa untuk pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Raya Pos, sedangkan Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah (*landrent system*) yang membebankan pajak langsung kepada petani. Dampak dari kebijakan ini serupa, yaitu meningkatkan penderitaan masyarakat akibat beban kerja berat dan tekanan ekonomi.

Selain itu, kedua pemimpin kolonial ini turut memberikan kontribusi terhadap perubahan struktural dalam administrasi pemerintahan. Daendels menciptakan birokrasi yang lebih modern untuk memperkuat kontrol kolonial, sementara Raffles menyederhanakan sistem pemerintahan lokal dengan menghapus lapisan feodalisme tertentu. Reformasi ini memberikan dasar bagi sistem administrasi yang masih relevan hingga masa kini. Di bidang ekonomi, baik Daendels maupun Raffles mendorong pola ekonomi berbasis ekspor yang menciptakan ketergantungan pada komoditas agraris, seperti kopi dan gula.

Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam fokus kebijakan dan pendekatan mereka. Daendels lebih menekankan pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan dan benteng, yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan keamanan kolonial. Sebaliknya, Raffles fokus pada reformasi agraria yang bertujuan menggantikan sistem kerja rodi dan meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial secara langsung dari petani. Di sisi lain, pendekatan Daendels cenderung represif dan kurang memperhatikan budaya lokal, sedangkan Raffles menunjukkan minat besar terhadap warisan budaya Nusantara, seperti melalui penelitian terhadap Borobudur dan pencatatan kekayaan flora serta fauna. Respon masyarakat terhadap kebijakan mereka juga berbeda. Kebijakan Daendels yang sangat menekan, terutama kerja paksa, sering memicu perlawanan dari masyarakat lokal. Sebaliknya, meskipun kebijakan Raffles tetap memberatkan, pendekatannya yang lebih progresif dianggap lebih adaptif terhadap situasi lokal (Oostindie, 2016). Persamaan dan perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan masing-masing pemimpin kolonial memberikan dampak jangka panjang yang kompleks terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, warisan yang masih dirasakan hingga saat ini.

Implikasi Sejarah untuk Masa Depan

Kebijakan kolonial yang dijalankan oleh Daendels dan Raffles memberikan pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi di masa kini. Meskipun pada awalnya dirancang untuk kepentingan penjajah, dampaknya yang bertahan lama masih memengaruhi struktur masyarakat modern. Dengan mempelajari implikasi sejarah ini, kita dapat merancang kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk menghadapi tantangan zaman. Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan kesejahteraan masyarakat (Akadun, 2023). Kebijakan Daendels, seperti pembangunan Jalan Raya Pos menggunakan tenaga kerja paksa, menunjukkan bahwa pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan dampak sosial dapat memicu penderitaan besar. Di era modern, pembangunan seharusnya melibatkan masyarakat secara langsung dan memastikan bahwa kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama.

Kebijakan pembangunan Indonesia saat ini menekankan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial, berbeda dengan masa kolonial

Daendels dan Raffles yang lebih berorientasi pada kepentingan penjajah. Jika Daendels membangun Jalan Raya Pos dengan kerja paksa yang menimbulkan penderitaan rakyat, dan Raffles menerapkan pajak tanah yang membebani petani, maka pemerintah modern berusaha memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, serta penyediaan layanan dasar—perumahan layak, air minum, sanitasi, dan listrik—dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan pendanaan negara. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana pemerataan, inklusi, dan keberlanjutan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Pelajaran pentingnya ialah melestarikan dan menghormati budaya lokal. Raffles, yang menunjukkan perhatian terhadap warisan budaya Nusantara, tetap tidak sepenuhnya menghindarkan kolonialisme dari eksploitasi budaya. Dalam konteks saat ini, pembangunan yang berkelanjutan harus memasukkan kearifan lokal sebagai bagian dari solusi, baik dalam menjaga lingkungan maupun dalam membangun identitas masyarakat yang tangguh. Selain itu, reformasi administratif yang diterapkan oleh Daendels dan Raffles menyoroti pentingnya birokrasi yang efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Namun, reformasi tersebut seringkali diabaikan aspek partisipasi masyarakat lokal, sehingga menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat. Hal ini mengajarkan bahwa tata kelola modern perlu menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan aktif dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Melalui refleksi atas warisan kebijakan kolonial, masyarakat dapat memahami akar dari tantangan sosial masa kini, seperti ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Dengan belajar dari masa lalu, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan kolonial yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles terhadap perubahan sosial di Nusantara pada abad ke-19 serta relevansinya terhadap tata kelola sosial-ekonomi Indonesia di era modern. Kebijakan Daendels dalam pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Raya Pos, mempercepat mobilitas dan integrasi wilayah, namun juga mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja. Sementara itu, reformasi agraria yang diperkenalkan oleh Raffles melalui sistem sewa tanah mengubah struktur kepemilikan lahan, meskipun pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Dampak kebijakan kedua tokoh ini tidak hanya dirasakan dalam periode kolonial, tetapi juga meninggalkan warisan yang membentuk pola pembangunan dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Reformasi administrasi yang mereka terapkan menjadi cikal bakal birokrasi modern, sementara transformasi sosial yang terjadi akibat kebijakan mereka memperlihatkan bagaimana intervensi kolonial membentuk dinamika kelas dan pola interaksi sosial di Nusantara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial memiliki dampak jangka panjang terhadap tatanan sosial dan ekonomi, yang masih relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, refleksi kritis

terhadap warisan kolonial diperlukan dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Referensi

- Absiroh, U. (2017). Understanding of History 350 years Indonesia colonized by Dutch. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau*, 1, 1-15.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Akadun, A. (2010). Perkembangan Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Era Pemerintahan Hindia Belanda. *Jurnal Civicus*, 10(1), 1-7. <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/26104>.
- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai*. Pujangga Press.
- Ardiansah. (2023). Analisis Sejarah Kebenaran Indonesia dalam Penjajahan Belanda selama 350 Tahun. *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(3), 177–186. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i3.26293>.
- Bachtiar, F., Sidharta, A., Rejeki, V. S., Tarigan, R., & Ardiyanto, A. (2022). De Groote Postweg Sebagai Pemicu Perubahan Struktur Kota di Jawa Bagian Barat. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v4i02.358>.
- Claudia, A., Azaria, A. P., Nurshaliha, G. A., & Hakim, I. A. (2024). Pengaruh Budaya VOC Menumbuhkan Korupsi di Kalangan Penguasa Indonesia di Era Kolonial. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i2.595>.
- Harahap, N. S., Sumbayak, D. Y., & Ramadhani, N. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Daendels Terhadap Masyarakat Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 560-564. <http://www.rayyanjournal.com/index.php/ar-rumman/article/view/4190>.
- Hariyono, H., & Wijaya, D. N. (2016). Thomas Stamford Raffles: Seorang Universalis Atau Imperialis? *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 33-44. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5144>.
- Hartatik, E. S. (2016). Perkembangan Jalan Raya Di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintahan Daendels. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 155–165. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i2.7177>.
- Hermawan, I., Abrianto, O., & Mainaki, R. (2020). Pengaruh Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Struktur Tata Ruang Kota Cirebon Berdasarkan Tinggalan Arkeologis. *Kalpataru*, 29(2), 117–132. <https://doi.org/10.24832/kpt.v29i2.653>.
- Hoogendijk, D. A. (2013). Mr. Herman Willem Daendels als Gouverneur ter kuste van Guinea. *New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids*, 25(1), 289–302. <https://doi.org/10.1163/22134360-90000480>.

- Marihandono, D. (2011). Upaya Pemberantasan Korupsi di Hindia Timur. In *VOC: Pedagang atau Penjajah*. Fadli Zon Library.
- Marihandono, D. (2014). Daendels dalam Naskah dan Cerita Rakyat. In *Seminar Internasional Tradisi Lisan IV*.
- Nas, P. J. M., & Pratiwo. (2020). Java and de groote postweg, la grande route, the great mail road, Jalan Raya Pos. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 158(4), 707–725. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003763>.
- Nurbaiti, B. (2025, November). Warisan Kebijakan Daendels dan Raffles: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Tata Kelola Indonesia Kontemporer. *Forum for Social and Humanities Studies*, 1(2), 82-98. <https://doi.org/10.65741/fshs.v1i2.9>.
- Oostindie, G. (2016). *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*. KITLV Jakarta.
- Toer, P. A. (2006). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Lentera Dipantara.
- Raharjo, Y. K. (2024). Kebijakan Kekuasaan Daendels di Jawa 1808-1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 10(1), 8-15. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v10i1.22563>.
- Rakhman, A. S., & Hidayat, A. (2021). Pembangunan Singapura sebagai Pusat Perdagangan di Asia Tenggara Pada Masa Gubernur Jenderal Raffles 1819-1820. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3173>.
- Setyawan, Y. H. (2020). Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816. *KARMAWIBANGGA Historical Studies Journal*, 2(2), 65-76. <https://doi.org/10.31316/fkip.v2i2.1087>.
- Sinaga, R., Pratama, D., Piliang, P. H., & Ningrum, D. M. (2024). Kemanusiaan dan Eksploitasi: Analisis Kebijakan Daendels di Tanah Jawa (1808-1811). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 270-276. <http://www.rayyanjournal.com/index.php/ar-rumman/article/view/3982>.
- Sinaga, R., Rajagukguk, A., Sitanggang, H., & Manullang, R. (2024). Kemajuan dan Kontroversi Kebijakan Agraria Raffles. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 529-537. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4170>.
- Syafaah, A. (2018). Kelas Sosial Dalam Sistem Landelijk Stelsel Masa Raffles (1811-1816). *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 6(1), 133–146. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i1.3252>.
- Tendi, T. (2017). Perkembangan Sosio-Ekonomi Dan Perkebunan Masyarakat Kuningan, 1830-1870. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 34–53. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.232>.
- Yuliati. (2013). Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 7(1), 96–103. <https://doi.org/10.17977/sb.v7i1.4740>.

Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesiambungan). *Diakronika*, 17(1), 90-103. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>.